



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS DAN FUNGSI	2
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026.....	6
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. PENGUKURAN KINERJA	11
B. ANALISIS KINERJA	13
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN.....	27
D. REALISASI ANGGARAN	27
E. ANALISIS EFISIENSI	28
PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis	vi
Tabel 2 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	7
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	10
Tabel 4 Realisasi Anggaran Tahun 2025	28

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam menciptakan *good governance*.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, secara optimalisasi peran dan peningkatan efesiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bengkalis, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS



HENDRIK DWI YATMOKO, S.Sos., MT
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19710904 199101 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator, dan target yang harus dicapai. Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 7 (tujuh) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi targetnya.

Keberhasilan pencapaian sebagai indikator kinerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis

NO	SASARAN	IKU	TARGET
1	2	2	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kearsipan	Indeks Pengelolaan Kearsipan	50,00
		Tingkat Digitalisasi Arsip	30,00
2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	63,04
		TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial)	Zona Hijau
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	72,30
4	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%
5	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses Penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap Instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi dokumen laporan kinerja tahun yang berisi pertanggung jawaban Kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang didalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini dimaksud sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Sebagai Instansi Pemerintah, maka Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2016 yang kemudian di rubah menjadi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 96 Tahun 2021 adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk menjalankan tugas pokok yang diamanatkan, maka fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan,
2. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan,
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis di dukung oleh struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Pustakawan Ahli Madya
- 4) Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- 5) Bidang Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Pustakawan Ahli Muda

- 6) Bidang Layanan Alih Media dan Otomasi Perpustakaan terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Pustakawan Ahli Muda
- 7) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Pustakawan Ahli Muda
 - Pustakawan Ahli Pertama
- 8) Bidang Kearsipan terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Arsiparis Ahli Muda
- 9) UPT

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini memberikan penjelasan tentang pencapaian kinerja diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan secara ringkas mengenai gambaran umum organisasi, landasan hukum, kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara singkat tentang dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan pencapaian sasaran-sasaran kinerja sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja selama tahun 2025. Dalam

bagian ini dilakukan analisis capaian kinerja organisasi dengan membandingkan antara target dan realisasi, capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, target RPJMD, penyebab peningkatan/penurunan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

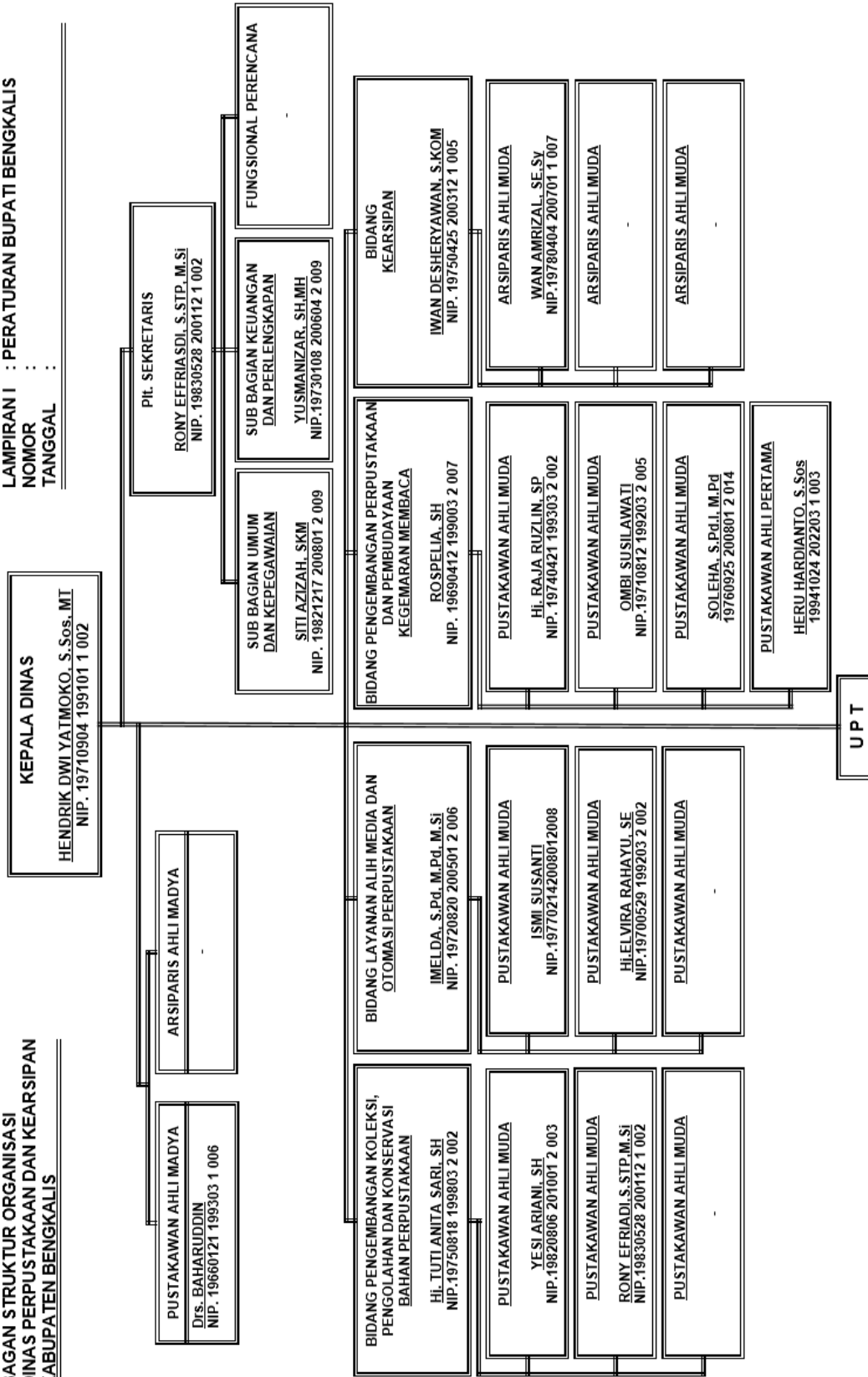
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

1. Perjanjian Kinerja

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BENGKALIS**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR :
TANGGAL :**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 merupakan Perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2021 – 2026 visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia”

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2021 – 2026 ditetapkan Misi sebagai berikut:

- 1.** Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat

Dari rumusan visi dan misi diatas, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis yaitu MISI II “Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.”

Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Pembangunan Literasi Masyarakat	200	250	300	350	400	450
	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,052%	0,052%	0,052%	0,052%	0,052%	0,052%
	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan Pertahun	260.546	273573	287.252	301.615	316.695	332.536
Jumlah Arsip Daerah yang Terpelihara	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	80%	80%	85%	85%	90%	90%

Tabel 2 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kearsipan	Indeks						
	Pengelolaan Kearsipan	50,00	53,00	55,00	57,00	60,00	60,50
	Tingkat Digitalisasi Arsip	30,00	32,00	33,00	33,50	34,00	35,00
Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Indeks						
	Pembangunan Literasi Masyarakat	63,04	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50
	TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial)	88,00	88,30	88,50	89,00	89,50	89,80
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	72,30	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50

Tabel 3 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 (Revisi Renstra)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pengganti Inpres Nomor 5 Tahun 2004), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuannya agar terwujud akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis berisikan penugasan dari Bupati Bengkalis untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah, kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Visi, Misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	SASARAN	IKU	TARGET
1	2	2	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kearsipan	Indeks Pengelolaan Kearsipan	50,00
		Tingkat Digitalisasi Arsip	30,00
2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	63,04
		TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial)	Zona Hijau
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	72,30
4	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%
5	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan Tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya. Sebagai dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan capaian kinerja selama satu tahun anggaran, diharapkan juga dapat menjadi umpan balik untuk membantu penyempurnaan Perencanaan pada tahun berikutnya.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis tahun 2025 dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 dengan realisasinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kearsipan	Indeks Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	49,00	55,59	113%	50,00	52,83	106%
		Tingkat Digitalisasi Arsip	0	0	0	29,00	33,92	117%	30,00	36,27	121%
2	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	63,04	53,86	106%	63,04	38,62	61%	63,04	5,3	8,41%
		TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial)	Zona Hijau (65,00)	Zona Hijau (63,00)	89%	Zona Hijau (65,00)	Zona Kuning (81,75)	100%	Zona Hijau (88,00)	Zona Kuning (88,00)	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	100%	BB	BB	100%	72,30	74,40	103%
4	Terwujudnya	Persentase	-	-	-	-	-	-	87%	100%	87%

	Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah									
5	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

B. ANALISIS KINERJA

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis telah tercapai dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator tersebut hampir seluruhnya dinyatakan “berhasil” dengan rata-rata capaian 87,68% dari target. Namun, terdapat 1 indikator yang berada sangat jauh dibawah target yang sudah ditetapkan. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kearsipan:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7	4	5	6	7
Indeks pengelolaan kearsipan	0	0	0	49,00	55,59	113%	50,00	52,83	106%

Pencapaian kinerja indikator Indeks Pengelolaan Kearsipan dapat terealisasi dengan baik atau realisasinya 52,83 dari target 50,00 karena kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk indeks pengelolaan kearsipan daerah **faktor yang mempengaruhi keberhasilan** yaitu dengan adanya:

1. Keberhasilan peningkatan Indeks Pengelolaan Kearsipan dipengaruhi oleh penguatan aspek regulasi dan kebijakan internal yang ditandai dengan penetapan serta pembaruan surat keputusan Tim Pengelola Arsip/Unit Kearsipan, penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan arsip dinamis, serta penerapan klasifikasi arsip dan jadwal rerensi arsip (JRA) secara konsisten. Dan juga kebijakan internal yang sudah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan sehingga pengelolaan berjalan lebih sistematis, tertib, dan sesuai standar nasional.

2. Capaian indikator juga didukung oleh pelaksanaan penataan arsip dinamis dan inaktif secara lebih terstruktur. Arsip aktif pada masing-masing unit kerja telah dikelola sesuai prinsip tata naskah dinas dan klasifikasi arsip, sementara arsip inaktif dipindahkan ke record center sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penyusutan arsip melalui pemindahan, pemusnahan, maupun penyerahan arsip statis dilaksanakan sesuai prosedur sehingga menciptakan efisiensi ruang dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip
3. Penunjukan pengelolaan arsip pada masing-masing unit kerja memperjelas peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip. Peningkatan kompetensi ini berkontribusi terhadap keseragaman penerapan kebijakan dan standar pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi faktor penting dalam peningkatan indeks. Pengawasan kearsipan internal dilakukan secara sistematis untuk menilai kepatuhan terhadap standar pengelolaan arsip. Hasil pengawasan tahun lalu ditindaklanjuti melalui perbaikan administratif dan teknis, serta dituangkan dalam laporan hasil pengawasan beserta rekomendasi perbaikan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator. Implementasi aplikasi pengelolaan arsip dinamis membantu proses pencatatan dan pengendalian dokumen secara lebih akurat. Digitalisasi arsip prioritas dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses sekaligus menjamin keamanan dokumen.
6. Keberhasilan capaian Indeks Pengelolaan Kearsipan tidak terlepas dari dukungan manajerial dan komitmen pimpinan daerah. Dukungan kebijakan serta alokasi anggaran untuk kegiatan kearsipan memberikan ruang bagi pelaksanaan program secara optimal. Penguatan fungsi unit kearsipan sebagai koordinator pengelolaan arsip mendorong konsistensi pelaksanaan di seluruh perangkat daerah. Selain itu, integrasi pengelolaan arsip dalam sistem akuntabilitas kinerja serta komitmen pimpinan dalam mendorong tertib arsip sebagai bagian dari reformasi birokrasi menjadi faktor strategis dalam peningkatan kualitas tata kelola kearsipan

Adapun yang menjadi faktor penghambat pada Indeks Pengelolaan Kearsipan

1. Meskipun capaian indikator melampaui target, masih terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM fungsional kearsipan di beberapa perangkat daerah. Belum seluruh unit kerja memiliki arsiparis atau pengelola arsip yang tersertifikasi, sehingga pelaksanaan pengelolaan arsip belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan pendampingan intensif dari Unit Kearsipan.
2. Implementasi kebijakan dan standar pengelolaan arsip belum sepenuhnya merata di seluruh perangkat daerah. Beberapa unit kerja masih menghadapi kendala dalam penerapan klasifikasi arsip, penataan arsip inaktif, serta penyusutan arsip sesuai ketentuan, sehingga diperlukan penguatan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang penyimpanan arsip (record center) yang representatif dan peralatan penyimpanan arsip, masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas penyimpanan dan keamanan arsip apabila tidak ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
4. Walaupun telah dilakukan upaya digitalisasi dan penerapan aplikasi pengelolaan arsip, pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya optimal di seluruh perangkat daerah. Masih terdapat keterbatasan dalam integrasi sistem dan konsistensi input data, sehingga efektivitas pengelolaan arsip berbasis elektronik perlu terus ditingkatkan.
5. Perbedaan tingkat pemahaman dan kepatuhan administratif antar unit kerja turut mempengaruhi konsistensi pelaksanaan pengelolaan arsip. Beberapa perangkat daerah masih memerlukan penguatan komitmen dalam penerapan standar kearsipan sesuai ketentuan nasional yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sebagai **tindak lanjut** atas berbagai kendala yang masih dihadapi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis akan melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan, serta mengupayakan optimalisasi peran pengelola arsip pada masing-masing perangkat daerah. Selain itu, peningkatan kepatuhan dan standarisasi pengelolaan arsip akan terus didorong melalui

monitoring dan evaluasi internal secara periodik, serta penyesuaian implementasi Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip (JRA) agar diterapkan secara konsisten di seluruh perangkat daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis juga akan secara bertahap meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, termasuk pengembangan record center yang representatif serta pengadaan peralatan penyimpanan arsip sesuai standar guna menjamin keamanan dan keselamatan arsip. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi akan terus dioptimalkan melalui pengembangan aplikasi pengelolaan arsip dinamis dan perluasan digitalisasi arsip prioritas, disertai penguatan sistem keamanan dan integrasi data. Koordinasi dan pembinaan juga akan diperkuat, baik secara internal maupun dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, guna memastikan pengelolaan arsip tetap selaras dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan nasional.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7	4	5	6	7
Tingkat Digitalisasi Arsip	0	0	0	29,00	33,92	117%	30,00	36,27	121%

Pencapaian kinerja indikator Tingkat Digitalisasi Arsip dapat terealisasi dengan baik atau realisasinya 36,27 dari target 30,00 karena kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk Tingkat Digitalisasi Arsip **faktor yang mempengaruhi keberhasilan** yaitu dengan adanya:

1. Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh adanya komitmen dalam mendorong transformasi digital di bidang kearsipan. Digitalisasi arsip diprioritaskan sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan, sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan secara lebih terarah dan terencana.
2. Pemanfaatan aplikasi pengelolaan arsip dinamis berbasis elektronik mendukung percepatan proses digitalisasi. Sistem ini mempermudah

pencatatan, penyimpanan, dan temu kembali arsip secara lebih efektif serta meningkatkan akurasi pengelolaan data.

3. Tersedianya perangkat pendukung seperti komputer, scanner, serta media penyimpanan elektronik turut mempercepat proses alih media arsip. Ketersediaan infrastruktur ini memungkinkan pelaksanaan digitalisasi berjalan lebih optimal dibandingkan perencanaan awal.
4. Adanya pelatihan dan pendampingan teknis kepada pengelola arsip meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan proses digitalisasi sesuai standar. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan jumlah arsip yang berhasil dialihmediakan secara tepat dan terdokumentasi dengan baik.

Adapun yang menjadi **faktor penghambat** pada indikator Tingkat Digitalisasi Arsip adalah sebagai berikut:

1. Meskipun capaian melampaui target, belum seluruh perangkat daerah memiliki infrastruktur teknologi yang merata. Perbedaan kapasitas perangkat dan jaringan dapat mempengaruhi kecepatan serta konsistensi proses digitalisasi arsip.
2. Jumlah arsip fisik yang cukup besar memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk dilakukan alih media. Kondisi ini berpotensi memperlambat pencapaian target jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan perencanaan bertahap.
3. Pengelolaan arsip digital memerlukan standar keamanan dan tata kelola yang ketat. Belum optimalnya penerapan sistem backup dan pengamanan data di seluruh unit kerja menjadi tantangan dalam menjamin keamanan dan keberlanjutan arsip digital.

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan peningkatan capaian tingkat digitalisasi arsip, bentuk **tindak lanjut** yang bisa dilakukan yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis akan melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur teknologi pada masing-masing perangkat daerah serta memperkuat sarana dan prasarana pendukung secara bertahap guna memastikan pemerataan kapasitas digitalisasi. Selain itu, akan disusun roadmap digitalisasi arsip yang memuat tahapan prioritas alih media, target kinerja yang terukur, serta strategi implementasi jangka menengah agar proses digitalisasi berjalan lebih sistematis dan

berkelanjutan. Penguatan sistem keamanan dan mekanisme backup data juga akan menjadi perhatian utama guna menjamin keamanan, keutuhan, dan ketersediaan arsip digital. Di samping itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan teknis akan terus dilakukan agar pemanfaatan aplikasi pengelolaan arsip elektronik dapat berjalan optimal dan selaras dengan standar kearsipan nasional yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sasaran 2

Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7	4	5	6	7
Indeks pembangunan Literasi Masyarakat	63,04	53,86	85%	63,04	38,62	61%	63,04	5,3	8%

Pencapaian indikator kinerja pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat hanya mampu menyentuh angka 5,3 dari target 63,04. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target berada pada kisaran 8,41%. Capaian ini menunjukkan adanya deviasi yang cukup signifikan dibandingkan target yang ditetapkan. Nilai IPLM diperoleh berdasarkan hasil penghitungan dan evaluasi nasional yang dilaporkan setiap tahun oleh Perpustakaan Nasional RI, sehingga capaian indikator sangat dipengaruhi oleh metodologi, pembobotan, serta kelengkapan data yang digunakan dalam penghitungan indeks secara nasional. Berikut merupakan Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Capaian:

1. IPLM merupakan indeks komposit yang tersusun atas beberapa dimensi literasi. Perubahan metodologi, indikator pembentuk, maupun bobot penilaian di tingkat nasional dapat mempengaruhi hasil akhir indeks secara signifikan, meskipun pelaksanaan program di daerah tidak mengalami penurunan yang drastis.
2. Sebagai indeks nasional, sebagian komponen pembentuk IPLM berada di luar kendali langsung OPD, seperti data lintas sektor dan variabel makro yang memerlukan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menyebabkan capaian indikator tidak sepenuhnya merepresentasikan kinerja internal perangkat daerah saja.

3. Target yang ditetapkan pada awal tahun kemungkinan belum sepenuhnya mempertimbangkan proyeksi nilai nasional atau tren penyesuaian instrumen penilaian, sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi.
4. Nilai indeks sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan validitas data yang diinput serta diverifikasi pada sistem nasional. Apabila terdapat komponen yang belum dilaporkan secara optimal atau mengalami perubahan mekanisme pelaporan, maka hal tersebut dapat berdampak langsung terhadap penurunan nilai indeks.

Sebagai **tindak lanjut** dan langkah perbaikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komponen pembentuk IPLM, termasuk identifikasi dimensi yang mengalami penurunan signifikan serta pemetaan faktor penyebabnya. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat untuk memastikan dukungan data dan program literasi berjalan secara terpadu. Selain itu, akan dilakukan peningkatan kualitas dan kelengkapan pelaporan data sesuai pedoman nasional, serta penyesuaian target indikator yang lebih realistis berdasarkan tren dan proyeksi nilai nasional. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis juga akan meningkatkan intensitas program literasi masyarakat berbasis kebutuhan lokal agar dampak intervensi lebih terukur dan berkontribusi terhadap peningkatan nilai indeks pada periode berikutnya, selaras dengan ketentuan dan metodologi yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7	4	5	6	7
TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial)	Zona Hijau (65,00)	Zona Kuning (63,00)	89%	Zona Hijau (65,00)	Zona Hijau (81,75)	126%	Zona Hijau (88,00)	Zona Hijau (88,00)	100%

Pencapaian indikator kinerja pada TPBIS (Transformasi perpustakaan Berbasis inklusi sosial) dapat terlaksana atau terealisasi 88,00 (Zona Hijau) dari target zona hijau dengan capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program transformasi perpustakaan telah berjalan sesuai dengan

target yang ditetapkan. Penilaian indikator ini mengacu pada hasil evaluasi nasional yang dilaporkan setiap tahun oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga nilai yang diperoleh mencerminkan hasil verifikasi dan penilaian berdasarkan kriteria yang berlaku secara nasional. Adapun **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan** yaitu didukung dengan :

1. Pelaksanaan program TPBIS dilakukan secara konsisten melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis perpustakaan, pelibatan komunitas, serta penguatan layanan yang berorientasi pada kebutuhan lokal. Program yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada layanan baca, tetapi juga mendukung peningkatan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Keberhasilan capaian indikator juga dipengaruhi oleh adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti komunitas literasi, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Kemitraan ini memperluas jangkauan layanan perpustakaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program inklusi sosial.
3. Pelaporan kegiatan dan dokumentasi program dilakukan secara tertib dan sesuai dengan pedoman nasional. Kelengkapan data dukung, laporan kegiatan, serta eviden pelaksanaan program berkontribusi terhadap optimalnya nilai yang diperoleh dalam evaluasi nasional.
4. Komitmen dan partisipasi aktif pengelola perpustakaan dalam menjalankan program transformasi turut menjadi faktor penting. Pendampingan dan pembinaan kepada perpustakaan desa/kelurahan maupun perpustakaan binaan mendukung keberhasilan implementasi indikator ini.

Adapun yang menjadi **faktor penghambat** pada indikator TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) sebagai berikut:

1. Karena nilai TPBIS ditetapkan berdasarkan evaluasi nasional, terdapat keterbatasan kendali langsung terhadap hasil akhir penilaian. Perubahan instrumen, bobot penilaian, atau kebijakan nasional dapat mempengaruhi capaian indikator meskipun pelaksanaan program di daerah relatif stabil.
2. Tidak seluruh perpustakaan binaan memiliki kapasitas SDM dan sarana prasarana yang sama. Perbedaan ini dapat mempengaruhi kualitas implementasi program inklusi sosial di lapangan.

- Partisipasi masyarakat dalam kegiatan berbasis inklusi sosial memerlukan pendekatan yang berkelanjutan. Apabila tidak diimbangi dengan inovasi program, tingkat keterlibatan masyarakat berpotensi mengalami fluktuasi.

Sebagai **tindak lanjut** atas upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian TPBIS, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis akan terus memperkuat kualitas implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui inovasi layanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Koordinasi dan pembinaan kepada perpustakaan binaan akan ditingkatkan guna memastikan keseragaman kualitas pelaksanaan program. Selain itu, penguatan kemitraan dengan komunitas dan pemangku kepentingan akan diperluas untuk meningkatkan dampak pemberdayaan masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis juga akan memastikan kelengkapan administrasi dan kualitas pelaporan sesuai pedoman nasional yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga capaian indikator tetap terjaga dan berpotensi meningkat pada tahun berikutnya.

Sasaran 3

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Predikat Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	100%	BB	BB	100%	BB (72,30)	BB (74,40)	103%

Untuk sasaran strategis pada Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah mendapat nilai 74,40 dari target 72,30. Dengan demikian, capaian indikator mencapai 102,90% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi internal. Selanjutnya berdasarkan perolehan LHE AKIP Internal yakni sebesar 74,40 dengan kategori predikat BB interpretasi sangat baik dengan perincian hasil penilaian sebagai berikut:

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	PREDIKAT NILAI	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,80	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	14,25	15,00
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100,00	72,15	74,40
Nilai Hasil Evaluasi Sakip		-	72,15	74,40
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB
Interpretasi :			Sangat Baik	Sangat Baik

Pencapaian pada indikator kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat terlaksana atau terealisasi 74,40 dengan predikat BB dari target predikat BB. Adapun **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan** sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian nilai SAKIP dipengaruhi oleh semakin selarasnya dokumen perencanaan, seperti Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, serta laporan kinerja tahunan. Indikator kinerja telah dirumuskan lebih terukur dan berorientasi pada outcome, sehingga mendukung peningkatan kualitas perencanaan kinerja.
2. Proses pengukuran kinerja dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis data, disertai penyusunan laporan kinerja yang lebih analitis dan tidak hanya bersifat deskriptif. Penyajian capaian indikator dilengkapi dengan analisis efisiensi dan tindak lanjut perbaikan, sehingga meningkatkan kualitas akuntabilitas.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk revidi dokumen kinerja oleh Inspektorat, membantu mengidentifikasi kelemahan sejak dini dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis.
4. Komitmen pimpinan serta keterlibatan aktif tim penyusun SAKIP menjadi faktor penting dalam memastikan dokumen kinerja disusun secara tepat waktu, berkualitas, dan sesuai pedoman evaluasi yang mengacu pada ketentuan Kementerian PANRB.

Adapun yang menjadi **faktor penghambat** pada indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Belum seluruh aparatur memiliki pemahaman yang sama terkait konsep manajemen kinerja berbasis outcome, sehingga masih diperlukan penguatan kapasitas dalam penyusunan indikator dan analisis kinerja.
2. Pengumpulan dan pengolahan data kinerja masih memerlukan penyempurnaan agar lebih terintegrasi dan real time, sehingga proses pengukuran dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien.
3. Masih terdapat ruang perbaikan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan benar-benar memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis dan indikator outcome yang ditetapkan.

Sebagai upaya **tindak lanjut** dalam meningkatkan predikat SAKIP pada periode berikutnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis akan melakukan penguatan kualitas perencanaan berbasis outcome dengan memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan indikator kinerja dan analisis capaian akan terus dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan internal. Selain itu, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja akan disempurnakan agar lebih terintegrasi dan akurat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis juga akan terus melakukan evaluasi internal secara berkala guna memastikan setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis serta peningkatan nilai SAKIP secara berkelanjutan.

Sasaran 4

Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat	-	-	-	-	-	-	87%	100%	87%

Daerah									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pencapaian kinerja indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis telah terealisasi secara optimal, yaitu mencapai 87% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan survei tersebut. Realisasi penuh ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dan konsisten dari seluruh jajaran, baik pimpinan maupun staf, dalam mendukung upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Partisipasi menyeluruh ini juga mengindikasikan bahwa kesadaran ASN terhadap pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi semakin meningkat, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun yang mempengaruhi **keberhasilan** sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan yang kuat menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong tingginya partisipasi ASN dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) dimana pimpinan secara aktif memberikan arahan, motivasi, serta contoh langsung kepada seluruh pegawai sehingga menciptakan dorongan moral bagi ASN untuk ikut berpartisipasi.
2. Tingkat kesadaran ASN terhadap pentingnya nilai-nilai integritas juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. ASN yang memahami bahwa SPI merupakan instrument untuk mengukur transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan akan lebih terdorong untuk berpartisipasi secara aktif.
3. Pelaksanaan sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan partisipasi ASN. Penyampaian informasi yang jelas terkait tujuan, manfaat, mekanisme, serta jadwal pelaksanaan SPI akan meminimalisir kebingungan dan kesalahpahaman.

Adapun yang menjadi **faktor penghambat** pada indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Kendalan teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat, atau gangguan pada system survey dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan SPI. ASN yang mengalami kesulitan dalam mengakses atau mengisi survey berpotensi menunda bahkan tidak menyelesaikan pengisian, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi secara keseluruhan.
2. Beban kerja ASN yang cukup tinggi seringkali menjadi alasan tertundanya pengisian survey. Dalam situasi tertentu, ASN lebih memprioritaskan penyelesaian tugas utama dibandingkan mengisi SPI, terutama jika tidak ada pengaturan waktu khusus.

Sebagai upaya **tindak lanjut** dalam meningkatkan indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis akan melakukan penguatan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan agar ASN memahami tujuan, manfaat, serta jaminan kerahasiaan data survei. Di samping itu, pelaksanaan SPI perlu diintegrasikan sebagai bagian dari budaya kerja organisasi yang menjunjung tinggi nilai integritas, sehingga partisipasi ASN tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga dilandasi kesadaran dan tanggung jawab. Melalui upaya tersebut, diharapkan tingkat partisipasi ASN dapat terus meningkat secara optimal dan berkelanjutan.

Sasaran 5

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah target 1 dokumen

Pencapaian kinerja indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis telah terealisasi secara optimal, yaitu tercapai 1 dokumen dari target yang telah ditetapkan sebesar 1 dokumen. Penyusunan 1 dokumen Peta risiko Perangkat Daerah merupakan Bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berbasis manajemen risiko. Dokumen ini memuat:

- Identifikasi risiko strategis
- Analisis tingkat kemungkinan dan dampak
- Rencana mitigasi risiko
- Pengendalian internal yang terukur

Adapun yang mempengaruhi keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan perangkat daerah menjadi faktor utama dalam mendukung penyusunan peta risiko. Pimpinan yang memberikan arahan, dukungan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko untuk mendorong seluruh unit kerja untuk lebih aktif dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
2. Operasional regulasi, pedoman, dan standar operasional terkait manajemen risiko menjadi faktor pendukung penting dalam penyusunan peta risiko perangkat daerah.
3. Penyusunan peta risiko memerlukan keterlibatan seluruh bidang atau iunit kerja dalam perangkat daerah. Koordinasi dan komunikasi yang baik antarbidang akan mempermudah pengumpulan informasi mengenai potensi risiko di masing-masing area kerja.

Upaya perbaikan dalam meningkatkan penyusunan peta risiko perangkat daerah perlu dilakukan melalui penguatan pemahaman ASN mengenai pentingnya manajemen risiko melalui sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Koordinasi antarbidang juga perlu ditingkatkan agar proses pengumpulan data dan informasi risiko dapat berjalan lebih optimal. Selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi perlu dikembangkan guna mendukung efektivitas pengelolaan data risiko serta mempermudah proses penyusunan dan pemantauan

peta risiko. Dengan langkah –langkah tersebut diharapkan penyusunan peta risiko perangkat daerah dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan berkelanjutan.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program Pendukung
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kearsipan	Indeks Pengelolaan Kearsipan	1. Program Pengelolaan Arsip 2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
		Tingkat Digitalisasi Arsip	1. Program Pengelolaan Arsip
2	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1. Program Pembinaan Perpustakaan
		TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Daerah

D. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 dana sebesar Rp. 15.049.086.385 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.369.062.886 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.423.453.847 Pada Triwulan ke IV tahun 2025 terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 13.528.325.508,50 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.520.760.876,50 Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.852.771.314 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.638.878.194,50. Secara umum realisasi anggaran Program dan Kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Dari total anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 13.528.325.508,50 telah terealisasi sebesar Rp.11.832.526.647 atau 87,46% yang terdiri dari belanja Pegawai dan belanja Barang dan Jasa dengan rincian realisasi sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai : Rp. 7.817.579.085
2. Belanja Barang dan jasa : Rp. 4.014.947.562

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis menyusun dan menetapkan Program dan Kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana dalam Tahun Anggaran 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Adapun rincian anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sebelum maupun setelah perubahan beserta realisasinya menurut program dalam perjanjian kinerja disajikan pada table berikut

Tabel 4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

SASARAN	Rata-rata capaian kinerja (%)	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kearsipan	113%	Rp. 72.010.740	Rp. 71.998.400	100%
Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	54%	Rp. 273.151.801	Rp. 271.990.048	99%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	103%	Rp. 99.623.799	Rp. 98.875.229	99%

Pada sasaran Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Daerah dengan realisasi capaian anggaran 100% dan realisasi anggaran Rp.71.998.400 dari dana sebesar Rp.72.010.740 sedangkan pada sasaran meningkatkan minat baca masyarakat rata-rata capaian anggaran sebesar 99% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 271.990.048 dari dana sebesar Rp. 273.151.801. Selanjutnya untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah rata-rata capaian anggaran 99% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 98.875.229 dari dana sebesar Rp.99.623.799.

E. ANALISIS EFISIENSI

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap masing-masing sasaran, maka dapat dilakukan analisa efisiensi terhadap masing-masing sasaran seperti terlihat pada tabel berikut:

No.	SASARAN	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah	103	100	3%
2	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	54	99	45%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	103	99	4%

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pengelolaan arsip daerah sebesar 103% dengan realisasi anggaran sebesar 100%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran berhasil melampaui target kinerja dengan penggunaan anggaran sesuai perencanaan. Kondisi tersebut mencerminkan pengelolaan sumber daya yang optimal, di mana output yang dihasilkan lebih tinggi dari target tanpa melebihi alokasi anggaran yang tersedia. Dengan demikian, pelaksanaan program pada sasaran ini dapat dikategorikan efisien dan efektif.

Pada sasaran meningkatkan minat baca masyarakat, capaian kinerja sebesar 54% dengan realisasi anggaran sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensi tercatat sebesar 45%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja belum tercapai secara optimal meskipun anggaran telah direalisasikan sepenuhnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pencapaian indikator, khususnya pada komponen Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang penilaiannya ditetapkan secara nasional. Secara efisiensi, sasaran ini memerlukan evaluasi dan penguatan strategi agar pemanfaatan anggaran ke depan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap capaian kinerja.

Meskipun pada sasaran peningkatan minat baca masyarakat tingkat efisiensi menunjukkan selisih yang cukup signifikan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan ketidakefektifan pelaksanaan program. Penurunan capaian lebih dipengaruhi oleh mekanisme

penilaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dihitung secara nasional serta adanya perubahan pendekatan pengukuran yang berada di luar kendali langsung perangkat daerah.

Program dan kegiatan yang mendukung peningkatan literasi tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan telah menghasilkan output yang terukur, seperti pelaksanaan kegiatan literasi, pembinaan perpustakaan, serta penguatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Namun demikian, dampak terhadap nilai indeks sangat dipengaruhi oleh variabel makro dan metodologi penilaian yang bersifat agregatif. Ke depan, perangkat daerah akan melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap strategi intervensi program, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menyesuaikan perencanaan dengan indikator penilaian nasional agar pemanfaatan anggaran dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan capaian indeks.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 103% dengan realisasi anggaran sebesar 99%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 4%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat dilampaui dengan penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya terserap, sehingga mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Peningkatan nilai SAKIP Perangkat Daerah menjadi indikator bahwa perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja telah dilaksanakan secara lebih terarah dan efektif.

Dengan demikian, analisis efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis telah mengelola sumber daya secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Ke depan, penguatan perencanaan berbasis outcome dan penajaman intervensi program akan terus dilakukan guna memastikan setiap rupiah anggaran memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. Keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan tercermin pada indikator sasaran yang ada pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Secara umum, kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik dan menggambarkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dari keseluruhan sasaran strategis yang ditetapkan, sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai bahkan melampaui target yang direncanakan.

Keberhasilan pada sasaran peningkatan pengelolaan arsip daerah serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja telah berjalan secara lebih sistematis dan terarah. Capaian tersebut juga didukung oleh tingkat efisiensi anggaran yang positif, di mana target kinerja dapat dicapai bahkan dilampaui dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

Pada sasaran peningkatan minat baca masyarakat, meskipun capaian indikator belum memenuhi target yang ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja serta menghasilkan output yang terukur. Penurunan nilai indikator lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dan mekanisme penilaian indeks yang bersifat nasional. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi strategis untuk perbaikan perencanaan dan penguatan intervensi program pada tahun berikutnya.

Analisis tingkat efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran secara umum telah mendukung pencapaian sasaran strategis secara proporsional. Prinsip efektivitas dan efisiensi telah menjadi bagian dari proses manajemen kinerja, yang tercermin dari keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja.

Ke depan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis akan terus melakukan penyempurnaan dalam penyusunan indikator berbasis outcome,

penguatan integrasi data kinerja, peningkatan kualitas evaluasi internal, serta optimalisasi kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan literasi masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi sekaligus pedoman dalam meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan baik dalam pemerataan dan pengembangan minat baca masyarakat. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis dapat diselesaikan.



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BENGKALIS